BANK BPD DIY DAN DISPAR DIY

Bersinergi Pulihkan Pariwisata

KR-Istimewa

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad dan Kepala Dispar DIY Singgih Raharjo dalam acara penandatanganan kerja sama.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY menandatangani kerja sama dengan Dinas Pariwisata (Dispar DIY) untuk mendukung pemulihan ekonomi, khususnya dari sektor pariwisata di DIY. Perjanjian kerja sama ditandatangani Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad dan Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo di Sindu Kusuma Edupark bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi pelaku wisata, Kamis (9/9).

Melalui kerja sama itu Bank BPD DIY dan Dispar DIY akan menggagas sejumlah program yang mendukung pelaku usaha wisata dan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY.

"Salah satu bentuknya dengan melakukan integrasi sistem ticketing pada aplikasi Visiting Jogja dengan sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standart (QRIS) Bank BPD DIY. Dengan integrasi ini, wisatawan bisa membeli tiket masuk berbagai destinasi wisata di DIY melalui aplikasi dan melakukan pembayaran secara cashless dengan QRIS Bank BPD DIY. Rencananya ada 248 destinasi wisata yang akan diintegrasikan dalam aplikasi," papar Santoso.

Menurut Santoso, selain kerja sama dalam pengembangan teknologi, Bank BPD DIY bersama Dispar DIY ke depannya juga akan melakukan kerja sama dalam beberapa hal. Seperti pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata ekonomi kreatif.

"Bank BPD DIY dan Dispar DIY selama ini telah menjalin kerja sama dengan baik untuk mendukung dunia pariwisata DIY. Bank BPD DIY selalu berperan aktif mendukung pemulihan dunia pariwisata DIY dengan memberikan berbagai layanan yang mudah, cepat dan aman," terangnya.

Singgih Raharjo menyampaikan apresiasi kepada Bank BPD DIY atas kerja sama yang baik untuk pengembangan pariwisata DIY.

Penandatanganan kerja sama juga disaksikan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY R Agus Trimurjanto, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ketua Asita DIY dan perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-DIY.

(Ria)-d

LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

Ikhtisar Eksekutif

PENYUSUNAN Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator berkriteria Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator berkriteria

sangat rendah, dengan rata-rata capaian sebesar 89,02%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Layanan perizinan tepat waktu
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria Sangat Rendah (≤ 50%), yaitu Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Layanan perizinan tepat waktu
		Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi

Sumber : Peraturan Bupati No 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
2.	Meningkatnya nilai investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	83	96,92	[illegible]
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,89	[illegible]
3	Pertumbuhan realisasi investasi	9,25	3,74	40,43

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	83	96,92	[illegible]
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,89	[illegible]

Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Indikator	Target	Realisasi	Kegiatan Pendukung
Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	• Sosialisasi pengelolaan perijinan • Operasional Pelayanan Perizinan • Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan • Pengelolaan Perijinan Online
Cakupan penetapan pelayanan perizinan	100%	100%	Pendataan dan Penetapan Perijinan
Cakupan penanganan permaslahan perizinan	100%	100%	• Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan • Survei Kepuasan Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Data Pengaduan Tahun 2020

No.	Sarana Pengaduan	2020
1	Telepon	1
2	Langsung	4
3	Faksimile	-
4	SMS	-
5	Online	5
7	Surat	10
8	Email	1
	Jumlah	21

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Berdasar Ranking

Unsur	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	RANKING	INDEKS UNIT PELAYANAN (DIKALI 0.11)
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3.85	1	0.428

Pengelolaan Perizinan Online

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Layanan perizinan tepat waktu	83,80	83	96,92	[illegible]	85	114,02

Izin Terbit

Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu	
	Jumlah	Persen
2888	2799	96,92

Data Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu 2016-2020

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96,92	116,77

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks	3.516
IKM Unit Pelayanan	87.89
Mutu Pelayanan	B
Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Rencana dan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,89	80	87,89	109,86	80,5	109,18

Data Capaian IKM Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai IKM
2016	78,99
2017	83,08
2018	83,29
2019	85,89
2020	87,89

SASARAN MENINGKATNYA NILAI INVESTASI

Realisasi Investasi

No	PMDN			PMA			TOTAL		
	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI	Proyek	Investasi (Rp.)	TKI
1	338	31.428.300.000	234	96	26.072.640.000	239	434	57.500.940.000	473

No	Tri wulan	TOTAL	PMDN				PMA			
		Rp	Perusahaan	Proyek	Investasi (Rp)	TKI	Perusahaan	Proyek	Investasi (Rp)	TKI
1	I	14,006,300,000	19	56	12,451,100,000	67	17	19	1,555,200,000	25
2	II	4,568,420,000	26	92	2,922,500,000	19	19	25	1,645,920,000	105
3	III	24,168,040,000	32	70	1,652,200,000	98	20	27	22,515,840,000	100
4	IV	14.758.180.000	120	120	14.402.500.000	50	25	25	355.680.000	9
TOTAL		57.500.940.000	197	338	31.428.300.000	234	81	96	26.072.640.000	239

Realisasi Investasi Per Sektor

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	**SEKTOR PRIMER**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	**SEKTOR SEKUNDER**	**100**	**20.223.500.000**	**52**	**5.280.480.000**
4	Industri Makanan	19	15.255.800.000	0	0
5	Industri Tekstil	20	1.400.600.000	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	9	1.248.900.000	2	51.840.000
7	Industri Kayu	4	1.078.300.000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	12	300.000	0	0
8	Industri Kimia dan Farmasi	3	0	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	5	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	10	0	3	2.125.440.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin &Peralatannya	0	0	0	0
13	Industri Mesin, Elektonik, Instrumen Kedokteran,Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	2	0	0	0
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
15	Industri Lainnya	16	1.239.600.000	28	892.800.000
III	**SEKTOR TERSIER**	**237**	**11.204.800.000**	**44**	**20.792.160.000**
16	Listrik, Gas dan Air	0	0	2	0
17	Konstruksi	24	116.900.000	0	0
18	Perdagangan dan Reparasi	179	9.223.200.000	39	20.792.160.000
19	Hotel dan Restoran	11	0	0	0
20	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	180.500.000	0	0
21	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0	0	0
22	Pertambangan	0	0	0	0
23	Jasa Lainnya	16	1.684.200.000	3	0
	JUMLAH	**338**	**31.428.300.000**	**96**	**26.072.640.000**

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
s.d 2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	32.789.391.520,52		
s.d 2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		
s.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		
s.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		
s.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74

Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Pertumbuhan realisasi investasi	9,25	3,74	40,43

Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah
		Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul